

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PAJAK (*DHARIBAH*)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*



Disusun Oleh:

Depi Rianita Sari

10522001085

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syari'at. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat. Tanpa ada batasan syariat, pemerintah menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya.

Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah konsep pajak menurut Yusuf Qardhawi, dan perkembangan pajak (*dharibah*) menurut Yusuf Qardhawi, serta analisa hukum Islam.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah study pustaka (*library research*) sebagai data primer tulisan ini adalah karya Yusuf Qardhawi tentang pajak yaitu buku Hukum Zakat. Teknik pengumpulam data yang penulis gunakan adalah *komperatif*, *Deduktif*, dan *Induktif*.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang pajak serta untuk mengetahui analisa Yusuf Qardhawi tentang pajak (*dharibah*).

Menurut Yusuf Qardhawi karena tanggung jawab pemerintah telah sangat meningkat sepanjang waktu, dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan jika tidak diizinkan untuk memungut pajak. Dengan demikian memungkinkan bahwa hak dari pemerintah islam untuk mendapat sumber dana melalui pajak tidak bisa ditentang asalkan saja pajak diambil dengan cara yang adil dan dalam batas tertentu memungkinkan.

Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa diperbolehkan mengambil pajak dari *ahlu dzimmah* agar sama dengan orang Islam dalam kewajiban mengeluarkan harta, meskipun pajak tersebut tidak disebut zakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi pemungutan pajak tersebut memenuhi syarat-syarat yaitu: Tidak ada sumber pendapatan lain, pembagian beban pajak yang adil, dipergunakan untuk kepentingan umat bukan kepentingan maksiat dan persetujuan para ahli dan cendekia.

Pajak merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah mencukupi untuk membiayai pengeluaran yang oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata. Melainkan karena adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan dan bencana lainnya.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah pendapatan negara yang harus dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI	
A. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi.....	16
B. Karya-Karya Yusuf Qardhawi.....	22

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK (*DHARIBAH*) DALAM

ISLAM

A. Pengertian Pajak (<i>Dharibah</i>).....	25
B. Dasar Hukum Pajak.....	30
C. Syarat-Syarat Pajak.....	32
D. Perbedaan dan Persamaan Pajak Dan Zakat.....	34
E. Aplikasi Pajak di Negara Muslim.....	38
F. Pendapat Ulama Tentang Pajak.....	46

BAB IV : PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PAJAK

A. Konsep Pajak Menurut Yusuf Qardhawi.....	51
B. Perkembangan Pajak Menurut Yusuf Qardhawi.....	59
C. Analisa Hukum Islam.....	70

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

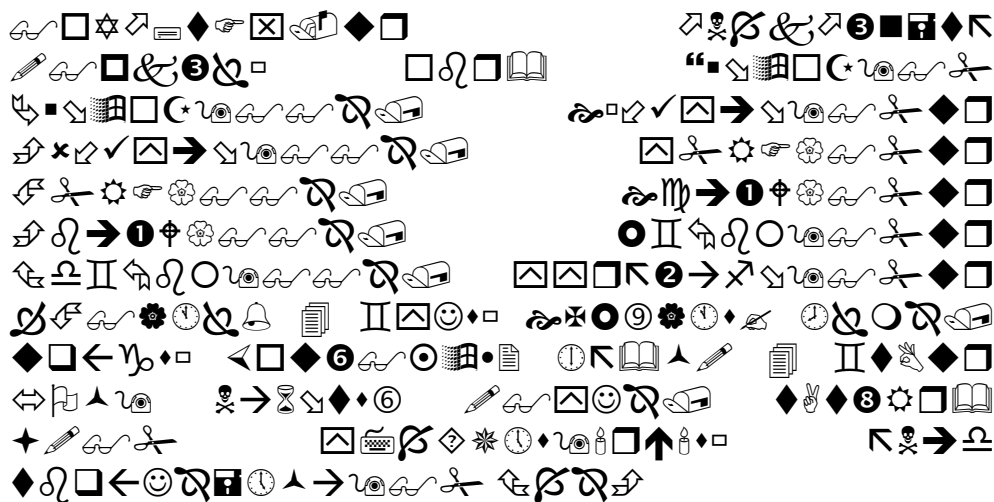
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syari'at. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa ada batasan syariat, pemerintah menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang di inginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh raja).

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa yang tidak memutus syariat (apa yang ditetapkan (Allah Swt) maka dia adalah zhalim¹.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45.



¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet I, h. 21.

Artinya : *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Q.SAL-Maidah:45)²*

Oleh karena itu pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari sebuah pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau akidah. Hukum pajak harus memiliki landasan atau dalil, yaitu al-Qur'an dan hadis. Jika ia memiliki landasan Alqur'an dan hadis, tentu akan memberi mamfaat bagi kemaslahatan umat.

Untuk itu, undang-undang pajak harus disusun oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Swt, bukanlah mereka yang di murkai-Nya (Nasrani) atau orang-orang yang sesat (Yahudi).

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata **أَبْضَرَ، بَضَرَ، ضَرَبَ** yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain³.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 61



Artinya;

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang:Toha Putra 2002), h.153.

³ Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Bab *Dharaba* h.815

*Lalu ditimpahkan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan (Q.S Al-Baqarah: 61)*⁴

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* di pungut secara *dharibah*, yakni secara yang wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah* ⁵.

Sebagaimana kita ketahui realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* bisa diartikan dengan pajak (muslim) istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam system ekonomi Islam⁶.

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syari'ah dengan pajak konvensional, maka kata *dharibah* lah yang tepat digunakan. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non Islam. Sebagaimana kita ketahui pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan pada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

⁴ Depag RI *op.cit.*, h. 11.

⁵ Gusfahmi, *op.cit.* , h. 29

⁶ *Ibid.*

Adapun landasan teori pajak terdiri dari dua bagian :

a. Landasan Teori Pajak Non Islam

Para ekonom muslim banyak yang berpendapat tentang pajak. Secara garis besar pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua landasan teori yaitu teori kekuasaan dan teori perjanjian.

1. Teori Kekuasaan

Menurut teori ini, rakyat membayar pajak kepada penguasa semata-mata karena penguasaan (raja/kaisar/presiden). Dalam kondisi seperti ini, pajak bermakna upeti atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti seperti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa⁷.

Ketundukan rakyat kepada raja harus ditunjukkan secara material berupa pajak dengan dua alasan. Pertama, Alasan teologis bahwa raja adalah titisan tuhan/dewa yang hadir akan penunjukan langsung oleh tuhan dan bertindak untuk kepentingan-kepentingan tuhan. Kedua, alasan material, bahwa rakyat hidup dari hasil bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang semuanya milik raja atau dalam kekuasaannya⁸.

⁷ Masdar, F Masdudi, Fathurahman Djamil, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah, Menuju Efektifitas Pemamafaatan Zakat, Infak Dan Shadaqah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h.42.

⁸ *Ibid.*

Oleh sebab itu, kepatuhan rakyat kepada raja tidak cukup hanya pada tingkat kesadaran abstrak dan simbolik sebagai abdi dalem, akan tetapi harus diaktualisasikan dalam bentuk nyata dan material berupa pajak sebagai persembahan, alias upeti artinya, pajak upeti adalah bukti ketundukan rakyat kepada raja selaku yang di pertuhankan, sekaligus ungkapan rasa syukur atas rezeki mereka terima dari buminya⁹.

Pajak upeti sebagai ketundukan rakyat kepada raja ini bukan hanya berlaku atas rakyat secara individual, tetapi juga secara kolektif pada bangsa dan negeri taklukan. Sebagai sesaji, pajak upeti diambil dari darah dan keringat rakyat sepenuhnya adalah milik penguasa, yaitu raja yang menerimanya. Hendak digunakan untuk apa, buat kepentingan siapa dan dengan cara bagaimana, sepenuhnya tergantung pada kemauan sang raja. Selain itu, karena upeti itu milik raja, maka seluruh atau sebagiannya di pergunakan bagi kepentingan sang raja dan kroninya. Bagi rakyat (pembayar) tidak ada kamus bagi hak mereka sebagai pengimbang kewajiban pajak yang terus dibayarkan. Mempertanyakan hak, dimata raja adalah subversi dan pengkhianatan

Dalam teori ini, negara pada dasarnya adalah raja itu sendiri seperti yang dikatakan oleh raja Perancis, louis XVI, "*I Etat c'est moi*" (Negara adalah saya). Karena Negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur dari kepentingan sang raja. Karena uang pajak itu dianggap milik raja berikut jajaran penguasaannya, maka korupsi sebagai kejahatan paling

⁹ *Ibid* .

menyengsarakan rakyat pun belum diasadari. Raja dan kroninya hidup serba mewah, mereka membangun monumen-monumen sebagai saksi atas kebesaran diri dan kekuasaannya. Piramida di Mesir, menara-menara kembar di Eropa, candi-candi di Jawa dari perspektif rakyat adalah bukti keunggulan daya cipta dan peradaban mereka, padahal dari sisi penguasa hal itu adalah ekspresi ambisi yang mempertontonkan kekuasaan dan kebebasan dirinya.¹⁰

2. Teori Perjanjian

Para pendukung teori ini memandang bahwa pajak itu dbayar sebagai imbalan jasa yang di peroleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya¹¹.

Para pendukung teori ini yaitu:

Adam Smith Mengatakan : “Perjanjian ini berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. negara memberikan berbagai pelayanan bagi warganya, maka warga negara membayar pajak kepada negara, sebagai imbalan atas pekerjaan-pekerjaannya.”¹²

¹⁰ *Ibid* .

¹¹ Yusuf Qardhawi , *Fiqhuz Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), Cet II, h.. 1015.

¹² *Ibid*.

Montesque dan Hobbes Mengatakan: “Perjanjian ini berbentuk jaminan keamanan. Dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi keamanan hartanya.”¹³

Sebagaimana kita ketahui ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakan dengan pajak dalam system kapitalis (non Islam) yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal tidak sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.

¹³ *Ibid* .

4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
5. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan negara.¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi¹⁵.

b. Landasan Teori Pajak Menurut Syariat

Apabila didalam baitul mal tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih kekaum muslim secara kolektif. Pemerintah mewajibkan pajak (*dharibah*) kepada orang-orang kaya, hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan. Kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan teori pajak harus mengacu sama dengan zakat. Alasannya subjek zakat dan pajak (*dharibah*) adalah sama, yaitu orang muslim. Dengan demikian tentu dua kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan yang satu sama yang lain merupakan

¹⁴ Gusfahmi , *loc.cit.*

¹⁵ *Ibid .* , h. 1006

pelengkap. Konsekuensinya, pajak bisa ditunaikan setelah zakat dikeluarkan. Dengan demikian, zakat sudah semestinya kredit (pengurang pajak).¹⁶

Menurut Yusuf Qardhawi¹⁷ asas teori wajib zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

1. Teori beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah-sebagai pemberi nikmat-untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka dan untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasulnya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, mana yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas perbuatan mereka sedang mereka tidak dianiaya.

2. Teori Khilafah.

Teori menjelaskan bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asal teori ini bahwa semua itu adalah kepunyaan Allah Swt. dan manusia adalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allah-lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini.

¹⁶ Gusfahmi, *op.cit* . , h.203

¹⁷ Yusuf Qardhawi , *op.cit* . , h.1017

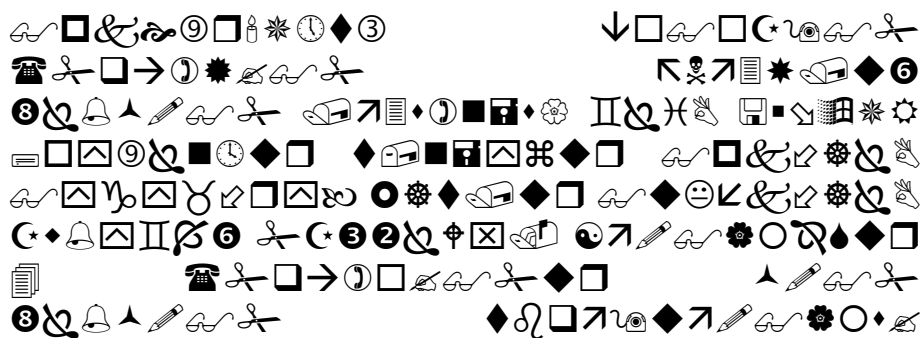
3. Teori Pembelaan Antara Individu dan Masyarakat

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingan ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.¹⁸

4. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh umat islam ada dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat derajatnya, namun ia berasal dari suatu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka “Hai anak cucu Adam” sebagaimana ia memanggilnya, ‘Hai manusia’. Di antara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 .



¹⁸ *Ibid.*



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*¹⁹.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pada pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pajak (*dharibah*) .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Konsep Pajak Menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana Perkembangan Pajak Menurut Yusuf Qardhawi?
3. Analisa hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada KONSEP YUSUF QARDHAWI TENTANG PAJAK (*DHARIBAH*).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Adapun Tujuan Penelitian Adalah:

1. Untuk Mengetahui Pendapaat Yusuf Qardhawi Tentang Pajak(*Dharibah*)

¹⁹ Depag RI , *op.cit.* , h. 99.

2. Untuk Mengetahui Analisa Yusuf Qardhawi Tentang Pajak(*Dharibah*)

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu (S 1)
2. sebagai pengembangan khazanah pengetahuan penulis tentang hukum Islam, khususnya Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (*Dharibah*).
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang berkepentingan dalam masalah ini.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara membaca, mengkaji,dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Diantara buku-buku kepustakaan yang menjadi sumber pokok (primer) dalam penulisan ini adalah buku DR. Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), Cet X Terjemahan oleh Didin

Hafidhudin Sedangkan bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan pembahasan ini dijadikan bahan pendukung (sekunder) yaitu:

a. Gusfahmi Pajak Menurut Syari'ah P.T Raja Grafindo Persada, cet 1
2007

b. Nuruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiscal
P.T Raja Grafindo Persada Cet 1 2006

Adapun data tersier yang digunakan ialah buku Ensiklopei Islam, kamus Bahasa Arab dan buku Metodologi Penelitian Hukum karangan Bambang Sunggono

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, dipergunakan *library research* yaitu dengan mengumpulkan buku-buku pokok, umum, agama dan yurisprudensi. Kemudian dibaca dan dianalisa, sehingga dapat penulis kategorikan buku-buku tersebut pada sumber primer dan sekunder sebagai landasan dalam penulisan ini.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang di bahas, penulis menganalisa data yang ada. Dalam membahas dan menganalisa data tersebut, penulis menggunakan suatu metode *Komperatif* yaitu membandingkan data dan membuat keterangan serta dianalisa, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

5. Metode Pembahasan

Dalam penelitian ini menggunakan pembahasan sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengungkap data / kaidah umum yang berhubungan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pajak selanjutnya dianalisa dan diambil secara kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu metode ini akan mengungkapkan serta mengetengahkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dan kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menganalisa semua data yang telah terkumpul untuk diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam mengadakan pembahasan penelitian supaya tidak terjadi penyimpangan, maka dikemukakan sistematika penulisannya:

BAB I : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Memaparkan Biografi Yusuf Qardhawi Yang Terdiri dari Profil Yusuf Qardhawi dan Karya-Karya Yusuf Qardhawi.

BAB III : Merupakan Tinjauan Teoritis Tentang Pajak (*dharibah*) dalam Islam, yang terdiri dari Pengertian Pajak (*dharibah*), Dasar Hukum pajak, Syarat-Syarat Pajak, Perbedaan dan Persamaan Pajak dan Zakat, Aplikasi Pajak di negara Muslim dan Pendapat Ulama Tentang Pajak.

BAB IV : Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak, yang terdiri dari Konsep Pajak Menurut Yusuf Qardhawi, Perkembangan Pajak Menurut Yusuf Qardhawi, dan Analisa Hukum Islam

BAB V : Merupakan Penutup Yang terakhir dari Penelitian ini Yang Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi

DR Yusuf Al-Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir didesa Shafat Turab Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harits, r,a¹.

Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam².

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghafal Alqur'an sejak usia lima tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung sejarah kesehatan dan ilmu-ilmu lain³.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Al-Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Alqur'an 30 juz pada usianya 10 tahun. Tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam mesjid.

¹ Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), Cet III, h. 45.

² Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h. 153

³ *Ibid.*

Prestasi akademik Yusuf Al-Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya kejurusan khusus bahasa arab di Al-azhar selama dua tahun, disini ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama tiga tahun. Akhirnya ia menggondol gelar diploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadist. Sebelum beliau dihadapkan dua alternatif yaitu, memilih antara jurusan Tafsir Hadist dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat pada Dr Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang lebih baik untuknya⁴.

Setelah tahun pertama dilalui di jurusan Tafsir Hadist, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf Al-Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Al Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor⁵.

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Al-Qardhawi perhatiannya terhadap kondisis umat islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel, cukup memperhatikannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al Banna yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta

⁴ *Ibid.* , h. 1449

⁵ *Ibid.* , h. 155

semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan, tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain :

Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti seramah-ceramahnya⁶.

Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslim. Berbagai aktivitas diikutinya, antara pengajian Tafsir dan Hadist serta ilmu-ilmu lainnya tarbiyah dan ibadah rukhiyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyantunan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin, dan kegiatan persiapan jihad dengan Israel.

Ketika aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat peran lawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantaranya, dan ketika banyak aktivitas Ikhwanul Muslim ditangkap tanpa sebab yang jelas Yusuf Al-Qardhawi termasuk pula di dalamnya.

Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qardhawi untuk berbuat sesuatu buat umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliah. Setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang kritis.

Disamping itu Yusuf Qardhawi banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim yang lain karena fatwa dan pemikirannya yang tokoh dan mantap, di antaranya tokoh tersebut adalah Bakhil Al Khauli, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu beliau juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmut Saltut mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang Filsafat. Meskipun Yusuf Al-Qardhawi kagum dan

⁶ *Ibid . , h. 34.*

hormat pada tokoh diatas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya.

Beliau pernah berkata :

Karunia Allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seseorang tokoh tidak menjadikan saya *taqlid* kepadanya. Karena saya bukan lembaran kopian dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan mamfaat tersebut ⁷.

Tokoh favorit Yusuf Al-Qardhawi adalah kelompok utama memperkaya perbendaharaan kebudayaan Islam dan tidak aneh kalau di pengaruhi oleh mereka dalam arti produk ilmiyahnya, sehingga Al-Qardhawi dapat menimbulkan sejumlah karangan yang berbobot yang terbesar diberbagai dunia Islam.

Dengan mengkorelasikan dengan ilmu-ilmu Islam, kemudian menampilkan Islam dengan wajah cemerlang.

Tetapi Yusuf Al-Qardhawi lebih mengutamakan kecintaannya terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dari pintu gerbang untuk memahami Alqur'an dan Hadist, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad ⁸.

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wal Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio ku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu juz'i tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taklid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, Alih Bahasa Mu'amal Hamidi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1996), Cet I, h.4 .

⁸ *Ibid* . , h. 156-157

rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan⁹.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanya hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai seorang *ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat¹⁰.

Itulah sebabnya Yusuf Al-Qardhawi, tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja¹¹.

Dalam masalah ijtihad Al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang tertulis oleh non muslim. Menurutya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya ulama tempo dulu¹².

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, “*Halal Dan Haram*” *op.cit.*, h. 10.

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet I, h. 1448

tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami *persialisati* dalam rangka global.

Menurut golongan modern ekstrim yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan diatas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada dibawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam menurutnya, bukan berarti berijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak yakni ilmu, iman, dan amal¹³.

Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas, ia juga berperan aktif dilembaga pendidikan. Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian menjadi dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas di Qatar¹⁴.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf Al-Qardawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktivitasnya dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar. Antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan¹⁵.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab. Yusuf Al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar I Tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekah dan Muktamar hukum Islam di Riyadh¹⁶.

B. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawy

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak karya ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar diluar dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

1. *Al-Khashooiish Al-Islam Li Al-Islam*, Dialih bahasakan dengan judul. “Karakteristik Islam (Kajian Analitik),” buku ini membahas bahwa Islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk “Rahmatan Lil’alamin”
2. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il Qarani Was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “Fiqih Prioritas (urutan amal yang tertentu).” Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam yang diprioritaskan atau diutamakan dari yang lainnya dengan argumentasi beliau yang kokoh dan kuat.

¹⁶ *Ibid* .

3. *Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep Dan Praktek Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan).¹⁷
4. *Ghairul Muslim Fil Mujtama’ Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Minoritas Non Muslim Didalam Masyarakat Islam. “didalam buku ini beliau membahas tentang hak-hak non muslim disebuah komunitas masyarakat muslim.
5. *Al-Ijtihad Fi Syari’ah Al Islamiah* (Ijtihad Dalam Islam) dalam buku ini beliau mengajukan bahwa dengan ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing manusia kejalan yang lurus, asal dilakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat.
6. *Fiqh Al-Zakah* (Hukum Zakat). Yang dalam buku ini beliau mengkaji dari zakat itu sendiri dari sudut pandang hukum Islam.
7. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* (Norma Dan Etika Ekonomi Islam). Didalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam.¹⁸
8. Disamping itu masih banyak lagi buku yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi ini didalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang belum diketahui secara rinci.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Manhaj Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet I, h. 35

¹⁸ *Ibid* . , h. 36

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK (*DHARIBAH*)

DALAM ISLAM

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dalam UU No 28 tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada Negara yang antara utang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat¹.

Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum².

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran

¹ Muhammad Awal Satrio Nugroho, *Hak dan kewajiban dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Cet I, h.3.

² Team, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve 2002), jilid V, h.2512

umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan³.

Lain lagi dengan Abdul Qadim Zallum menurutnya pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta⁴.

Yang dimaksud dengan pajak menurut Yusuf Qardhawi ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan , tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara⁵.

Dari berbagai rumusan diatas, maka perlu rasanya penulis membuat suatu kesimpulan tentang pemaknaan dari pajak itu sendiri, sehingga akan menghasilkan suatu defenisi yang holistik, yang mengakomodir berbagai pendapat yang nantinya suatu defenisi yang rajih (kuat).

Pajak ialah harta yang diwajibkan di bayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di *Baitul Mal* tidak ada uang atau harta.

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama,1998), Cet V, h. 12.

⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor : Thariqul Izzah,2002) , Cet II, h.138.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 2006), cet II, h. 1006.

Dharibah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Sabda Rasulullah SAW “

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرٌ فِي الْإِسْلَامِ (رواه مالك وابن ماجه والدارقطني)

*Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan.”*⁶.

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar *dharibah* tersebut hanya di bebaskan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara *makruf*⁷

Dharibah ini diutamakan diperuntukkan sebagai :

1. Pembiayaan jihad dan segala hal dan harus dipenuhi yang terkait dengan jihad
2. Pembiayaan Para Fuqara, Orang Miskin, Ibnu Sabil.
3. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemamfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak di biyai maka bahaya nya akan menimpa umat.
4. Pembiayaan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam, dan mengusir musuh.

⁶ Imam Musbikin, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), cet I h. 67.

⁷ Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet I, h. 500.

Pajak (*dharibah*) ini diwajibkan kepada semua orang sesuai dengan ketentuan wajib setor. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak ini sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuan. Bahkan pemerintah berwenang untuk menetapkan atau bahkan menghapuskan tergantung atau sesuai dengan kebutuhan.

Pendapat itu diperkuat lagi dengan hadis Nabi Saw

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقَّاسِيَّ الزَّكَاةِ
ثُمَّ تَلَايَسَ الْبِرَّ أَنْ تُؤَلُّوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (رواه الترميذى و بن ماجه)

Dari Fatimah binti Qais r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat." Lalu beliau membaca ayat al-qur'an surat Al-Baqarah Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebajikan. (H.R Tarmidzi san Ibnu Majah)⁸.

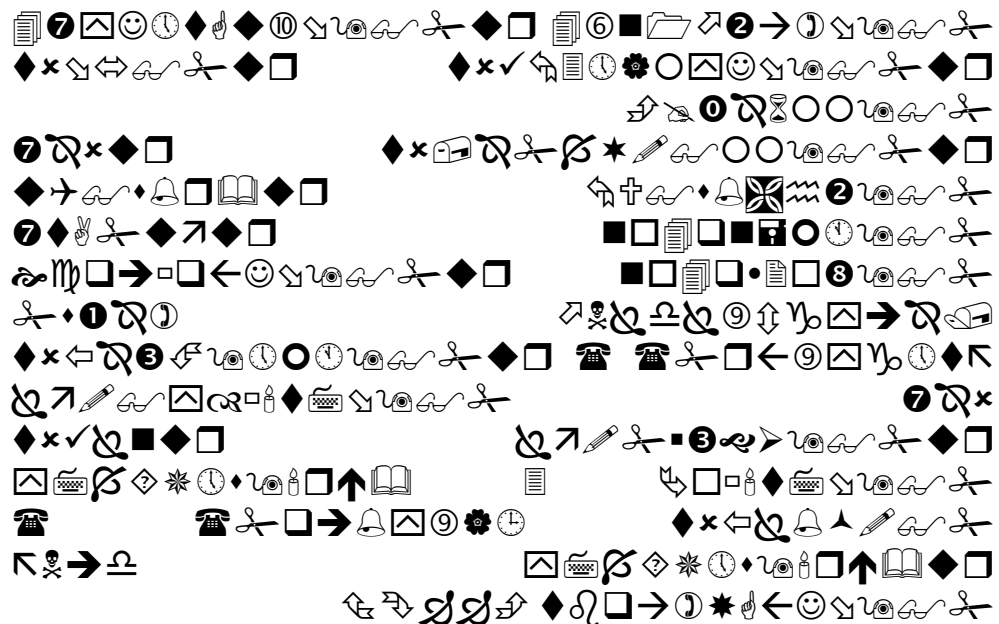
Didin Hafidhudin mengemukakan beberapa alasan kewajiban kaum muslim untuk membayar pajak disamping zakat⁹

1. Al -Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 177



⁸Tarmidzi, *Sunan Turmudzi*, (Riyad : Dar Er Salam, 2002), cet I, h. 1711

⁹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT Gema Insane Press, 2002) , 60.



Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah :177)¹⁰*

2. Perintah dari *Ulil Amri* (Pemerintah) Wajib Ditaati Selama Mereka

Menyuruh Pada Kebaikan Dan Ketaatan Serta Kemaslahatan

Bersama.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59



¹⁰ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang : Toha Putra 2002) h, 32



Artinya

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)¹¹

3. Solidaritas Sosial Dan Tolong Menolong Antara Sesama Umat Manusia

Dalam Kebaikan Dan Takwa Merupakan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi¹².

Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 2



Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.*

¹¹ Ibid h.114

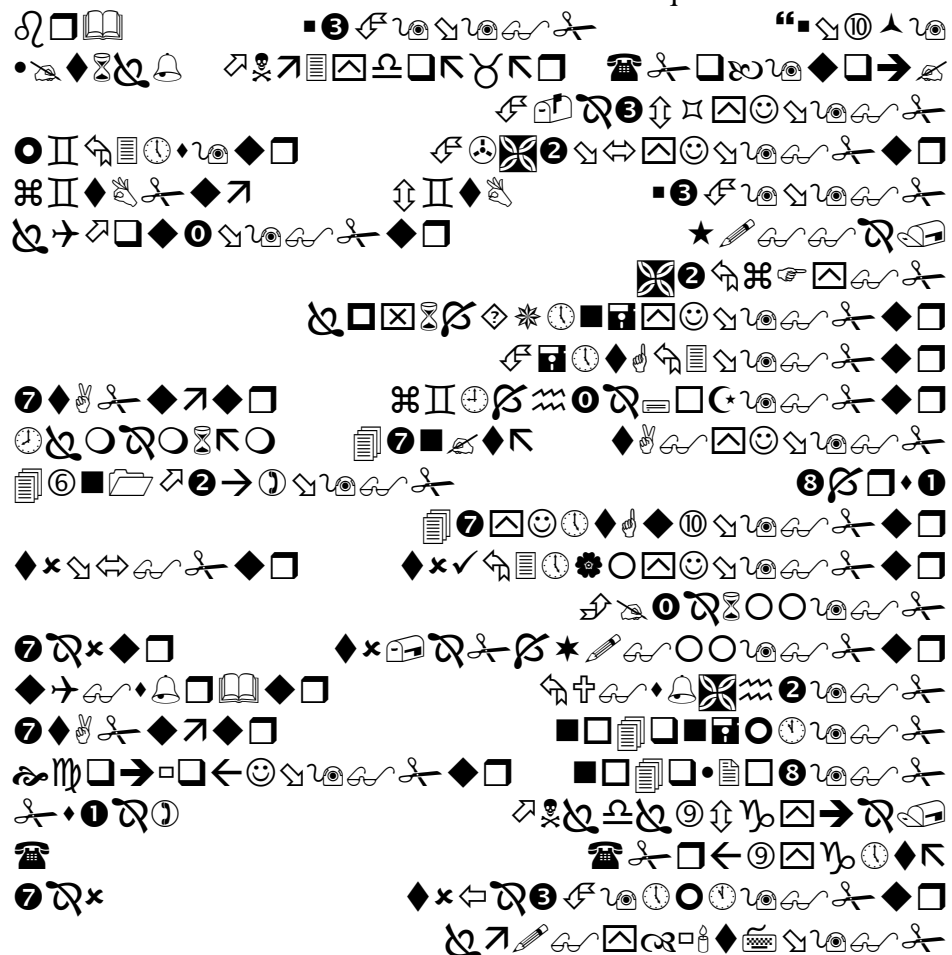
¹² Didin hafidhudin, *op.cit* . , h 62

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.(Q.S An-Nisa :2)¹³

B. Dasar Hukum Pajak

Setiap permasalahan (hukum) tentu saja mempunyai dasar hukum sebagai landasan tentang ketentuan hukum yang berlaku apakah suatu perangkat hukumnya kuat atau sebaliknya yaitu lemah. Segi kelangsungan hidup suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat¹⁴.

Firman Allah Swt Dalam Surat Al-Baqarah : 177



¹³ Depag RI *Op.Cit.* , h. 99

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: C.V As-Syafa, 1989), h. 12.



Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.¹⁵*

Ayat ini menjelaskan adanya kewajiban atas harta selain zakat.

Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir dan seterusnya sebagai pokok dan unsur kebaikan. Sebagaimana maksud dari pajak itu sendiri adalah untuk menciptakan antara umat Islam supaya saling tolong menolong dan harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Kemudian pajak ini memiliki kepentingan yang tak kalah pentingnya dengan zakat yang mana pajak juga untuk membiayai berbagai keperluan negara, yang tidak terpenuhi dari zakat.

C. Syarat-Syarat Pajak

1. Tidak Ada Sumber Pendapatan Yang Lain

Pajak yang dipungut dari rakyat hendaknya merupakan alternatif terakhir apabila tidak ada sumber pemasukan lain untuk menutupi

¹⁵ Depag RI, *op.cit* . , h. 32.

pengeluaran negara. Menurut Yusuf Qardhawi, pada dasarnya harta seseorang tidak boleh diganggu dan pemiliknya bebas dari segala beban, baik material maupun non-material. Dengan demikian, harta seseorang tidak boleh dirusak atau diambil kecuali ada kebutuhan yang pasti. Apabila tidak ada keperluan, atau ada keperluan, sedang pemerintah mempunyai biaya atau punya sumber yang dapat menutupi keperluannya, maka pemerintah tidak boleh membebankan pajak.¹⁶

2. Pembagian Beban Pajak Yang Adil

Apabila tidak ada jalan lain untuk menutupi kebutuhan negara selain memungut pajak, maka keputusan itu hanya boleh, tetapi wajib menurut syara' diberikan secara adil. Artinya, tiap golongan rakyat memperoleh beban secara adil dan tidak dilakukan secara diskriminatif besarnya pungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga dimungkinkan tidak sama besarnya beban pajak masing-masing anggota masyarakat¹⁷.

3. Dipergunakan Untuk Membiayai Kepentingan Umat Bukan Kepentingan Maksiat

Pajak tidak cukup Hanya dipungut secara adil dan dikenakan bebannya secara adil sebelum hasilnya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga, pejabat dan orang-orang dekatnya. Hal ini

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *op cit* . , h. 1087.

¹⁷ *Ibid*

telah diberi oleh para Khulafa Rasyidin dan para sahabat yang menekankan penggunaan kekayaan masyarakat itu pada sasaran yang telah ditetapkan syara'.

4. Persetujuan Para Ahli dan Cendikia

Pemerintah suatu negara tidak boleh memungut pajak tanpa mendapat masukan dan persetujuan para ahli dan cendekia dari kalangan masyarakat. Mereka dianggap mampu melakukan analisis terhadap rasionalitas beban pajak terhadap kebutuhan negara, dan mampu membuat peraturan-peraturan yang menjamin pembagian beban itu terhadap rakyat secara adil. Di samping itu, mereka dianggap mampu mengawasi penggunaan hasil pendapatan pajak yang terkumpul, sehingga benar-benar digunakan untuk berbagai kepentingan¹⁸.

Pada masa sekarang, ketentuan tentang pajak tersebut harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat¹⁹.

D. Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa persamaan antara zakat dan pajak yaitu:²⁰

a. Unsur Paksaan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid* h. 1006

[illegible]

b. Unsur Pengelola

Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60

[illegible]

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,

²¹ Depag RI, *op.cit.* , h.273.

*dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah :60)*²²

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata selaku individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh lembaga khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu uang disebut amil zakat.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut aturan-aturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Dari Sisi Tujuan

Yusuf Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak wajib zakat (*muzakki*). Pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan sosial. Sedangkan pajak juga memiliki tujuan yang relatif sama dengan zakat, yaitu terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak²³. Sementara itu Sjechul Hadi Purmono mengemukakan bahwa terdapat persamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu

²² *Ibid.* , h.264.

²³ Subiyakto Indra Kesuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988), h. 114.

masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual²⁴.

- d. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.
- e. Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat.

Perbedaan Antara Zakat Dan Pajak yaitu :

1. Dari Segi Nama dan Etiketnya

Perbedaan zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari segi etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan kata pajak yang lebih tepat digunakan yaitu kata *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharaba*, yang artinya utang, pajak tanah, atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.²⁵

2. Mengenai Hakikat Dan Tujuannya

²⁴ Sjezul Hadi Purmono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 77-78.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 1007

Diantara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara-negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.

3. Mengenai Batas Nisab Dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syari'at. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, prosentase, harga dan ketentuannya.²⁶

4. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslim ada dimuka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun. Sedangkan pajak tidak memiliki sifat tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak diperlukan lagi.

5. Mengenai Pengeluarannya

²⁶ *Ibid.* , h 1007

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah Saw dengan perkataan perbutannya. Sasaran itu terang dan jelas, setiap muslim dapat mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri, bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan KeIslaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.²⁷

Oleh karena itu anggaran zakat terpisah dari anggaran belanja negara secara umum. Zakat harus dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan qur'an, sebagai suatu kewajiban dari Allah.

6. Hubungan Dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua, bila menghendaki.

E. Aplikasi Pajak di Negara Muslim

Kemudian Yusuf Qardhawi membolehkan adanya pemungutan pajak-pajak yang adil antara lain:

- a. Karena jaminan / Solidaritas Sosial Merupakan Suatu Kewajiban

²⁷ *Ibid.*, h . 1010

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sosial tersebut, maka di bolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak²⁸.

Menurut Yusuf Qardhawi apabila ada keperluan yang perlu ditanggulangi bersama pungutan tersebut di benarkan meskipun akan menghabiskan seluruh harta.

b. Sasaran Zakat Itu Terbatas, Sedangkan Pembiayaan negara Itu Banyak Sekali

Sasaran zakat terbatas pada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan dengan demikian zakat adalah baitul mal yang bersifat khusus, yaitu anggaran yang berdiri sendiri. Para ahli fikih tidak membolehkan mencampuradukkan harta zakat dengan kekayaan lain dari sumber lain. Zakat harus di gunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syari'ah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial.

Atas dasar itu mereka berpendapat bahwa dana zakat tidak boleh dipergunakan untuk membangun jembatan, perbaikan jalan, membuat sungai pembangunan mesjid, sekolah dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim karena adanya sebuah kaedah yang mengatakan

²⁸ *Ibid.*, h. 1081

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ

*“Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan lain yang mubah) maka hal itu menjadi wajib pula.”.*²⁹

c. Kaidah-kaidah hukum syara’

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan kepada nash-nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis, juga dilandaskan kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum hukum syara’. Dari kedua kaedah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas mamfaat dari dua hal yang sama-sama bermamfaat, memilih salah satu bahayanya lebih kecil dari dua hal keadaan yang sama-sama berbahaya.³⁰

Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutan untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi, seperti penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Apabila negara Islam modern dibiarkan tanpa pajak untuk membiayainya, maka dapat di pastikan bahwa dalam waktu singkat akan hilang kemampuannya dan lambat laun akan menjadi lemah, apalagi bila muncul ancaman militer asing terhadap negara tersebut

²⁹ Mukhlis, Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath hukum-hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1991), Cet 3, h. 21.

³⁰ *Ibid.*, h. 1082

d. Jihad Atas Harta dan Tuntunannya Atas Biaya Yang Besar

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Sebagai salah satu bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah dari rakyatnya adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta.

e. Kerugian Dibalas dengan Keuntungan

Dana yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai segala keperluan pengeluaran negara yang mamfaatnya kembali kepada seluruh rakyat seperti untuk pertahanan, keamanan, hukum pendidikan, kesehatan, pengangkutan, perhubungan, pengairan dan kepentingan-kepentingan lain yang diambil mamfaatnya oleh seluruh negara tersebut.³¹

Apabila seseorang memperoleh faedah dari negara dan pengawasan dan menikmati fasilitas untuk umum dibawah bimbingan pengaturan dan perlindungan terhadap keamanan dari luar negeri, maka kewajiban orang tersebut untuk menyokongnya dengan harta yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Seperti halnya seseorang yang memperoleh mamfaat dan keuntungan dari masyarakat dengan berbagai kegiatannya sebagian pelaksana dalam negara, maka sebagai timbal baliknya, ia wajib menyerahkan sejumlah harta tertentu dari pajak dan kewajiban sebagai penjabaran dari pada prinsip yang

³¹ *Ibid.* , h. 1085.

telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu kerugian dibalas dengan keuntungan (*al-ghurmu- bil-ghurmi*).

Oleh sebab itu kewajiban pajak (*dharibah*) ini tidak mungkin akan dibebankan kepada non-muslim, dimana mereka tidak bersedia membela *Daulah* (negara) yang tidak diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Oleh sebab itu pulalah, hanya kaum muslim yang punya keyakinan bahwa pajak yang mereka keluarkan adalah untuk kemaslahatan umat dan kejayaan Islam sebagai *dinul haq*, yang harus dibela dan dipertahankan sepanjang masa.

Oleh karena itu, kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan teori pajak mengacu (sama) dengan zakat. Subjek zakat dan pajak (*dharibah*) adalah sama yaitu orang muslim.

Didalam pendapatan pajak kita harus memperhatikan siapa yang dijadikan subjek dan objeknya. sebagaimana dijelaskan subjek pajak terdiri dari

1. Subjek Pajak ialah badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjek yang bertempat tinggal dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000, yang menjadi subjek pajak ialah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Badan

c. Bentuk usaha tetap³²

Sedangkan para ulama fiqh sepakat bahwa yang menjadi subjek pajak ialah seorang muslim yang dewasa yang normal, merdeka dan memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu dan syarat-syarat tertentu³³.

Selain subjek zakat yang berupa individu (person), zakat juga dapat dikenakan kepada badan hukum sebagaimana halnya pajak. Badan-badan hukum tersebut seperti perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut³⁴.

Sedangkan Al-Mawardi mengatakan subjek (*kharaj*) pajak ialah orang kafir dan juga orang muslim (karena membeli tanah *kharjiah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah *kharaj* masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharaj* sebagaimana keadaan sebelumnya.

2. Objek pajak ialah benda yang terkena wajib pajak. Sebagian orang menamainya sumber pajak.

³² Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) cet I h. 186.

³³ Yusuf Qardhawi *op.cit.*, h. 96.

³⁴ *Ibid.*, h. 490-497.

Sedangkan Rohmat Soemitro mengatakan yang dijadikan objek pajak ialah segala sesuatu yang terjadi dimasyarakat, seperti pajak keadaan, perbuatan maupun peristiwa³⁵.

Para ahli keuangan menyebutkan, bahwa pembagian pajak yang terpenting dilihat dari segi objeknya yaitu:

a. Pajak Kekayaan ialah harta yang dizakat dan kadarnya, sebagaimana diwajibkan Islam, nyata dan jelas, bahwa syari'at Islam tidak memungut dengan satu sistem pajak, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemikir terdahulu.

b. Pajak Pendapatan

Pendapatan dianggap objek pajak terpenting pada zaman modern. Pendapatan ialah tambahan harta Yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pada asalnya seluruh sumber-sumber itu bersifat tetap, Maksudnya tetap dalam arti relatif. Akan tetapi ada juga yang berasal dari sumber-sumber bertingkat. Perbedaan tingkat tersebut biasanya ditentukan oleh perbedaan beban suatu pajak³⁶

c. Pajak Kepala yaitu pajak kekayaan, pajak pendapatan dan pajak perorangan (pribadi)

Sedangkan Rohmat Soemitro mengatakan yang dijadikan objek pajak ialah adanya pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak penghasilan, pajak

³⁵Rohmat Soemitro, *Asas-Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Refika Aditama 1998), cet V, h. 101.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*

kekayaan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, dan pajak jalan³⁷.

ADAPUN SUMBER PENDAPATAN NEGARA MENURUT ISLAM

No	Nama pendapatan	Jenis pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan penggunaan
1	Ghanimah	Tidak resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 kelompok
2	Zakat	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 kelompok
3	Ushr shadaqah	Tidak resmi	Muslim	Hasil Pertanian Dagang	Tetap	8 kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Hasil Tanah	Tidak Tetap	Umum
6	Bea cukai	Resmi	Non Muslim	Barang Dagang	Tidak Tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8	Pajak lain (<i>dharibah</i>)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Kebijakan fiskal dianggap untuk sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan untuk dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah)³⁸.

Sedangkan Abu Yusuf mengatakan penggunaan *insentif* pajak dengan maksud mendorong penanaman tanah tandus untuk meningkatkan pemasukan dan kekayaan negara ditemukan dalam system keuangan Islam. Secara

³⁷ Rohmat Soemitro, *op.cit* . , h. 102.

³⁸ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti 1997), Cet I, h.230.

umum pemberian insentif pajak sebagai sarana untuk mendongkrak aktivitas ekonomi yang dikenal sebagai ciri khas kebijakan keuangan Islam.

F. Pendapat Ulama Tentang Pajak

Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Boleh

Kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di bolehkan antara lain:

1. Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, menyebutkan bahwa semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Ibnu Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari³⁹
2. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara sangat bagus mereflesikan arus pemikiran sarjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu propinsi.

³⁹ Abu Yusuf , *Islamic Economic;Public Finance In Early Islamic Thought*, (New Delhi: Goodwoorbook, 2002), cet I, h. 141

Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dan jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu, atau pengikutu. Dan jangan kamu menarik dari orang-orang melebihi kemampuan membayarnya⁴⁰.

3. Sayyid Rasyid Ridha pernah ditanya mengenai putusan orang nasrani di India terhadap tanah, ad ayang separuh dan ada yang sperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat) seperti 1/10 atau 1/20?. Beliau menjawab: “Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran. Apabila dipungut oleh amil dari imam dalam Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajiban imam atau amilnya waib membagikan zakat kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat”. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.
4. Hasan Al-Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasai'il* ia mengatakan melihat tujuan keadilan dan distribusi pendapatan

⁴⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2001), Cet III, h. 308

yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran Islam.

5. Sedangkan Yusuf Qardhawi menekankan bahwa zakat itu adalah kewajiban rutin yang kadarnya telah ditentukan dan wajib kepada setiap orang secara terus menerus, Sedangkan adapun kewajiban lain selain zakat yaitu datang sewaktu-waktu dan kadarnya tidak ditentukan seperti pajak, ia tergantung dari keadaan, kebutuhan dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman, lingkungan dan kebutuhan⁴¹. Jadi, kewajiban muncul bukan karna adanya harta, namun karena kewajiban untuk membantu orang lain dan mencukupi kebutuhan negara. Kewajiban ini tidak terus menerus bisa dihapuskan, bila keadaan baitul mal terisi kembali.

Kebanyakan pajak ini dijalankan di negara muslim, alasan lainnya mungkin karena pajak ini telah didiskusikan secara sangat komprehensif oleh penulis barat dari sudut pandang tujuan kemanusiaan dalam masyarakat sehingga hampir tak ada alasan bagi para penulis Islam yang menganalisa pajak-pajak ini mengarah pada pemungutan pajak yang berlebihan, ketidakefisienan, dan ketidakadilan sehingga melanggar prinsip-prinsip dalam syari'ah. Jauh sebelum Adam Smith mengatakan tentang sistem perpajakan ulama Islam telah terlebih dahulu mendiskusikan prinsip-prinsip perpajakan seperti Umar bin Abdul Aziz yang menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan penuh keadilan dan kemurahan hati.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *loc.cit.*

Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Haram

Disamping sejumlah fuqaha yang menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat.

Dr Hasan Turobi dari Sudan dalam bukunya *principle of governance, fredoom, dan responsibility in Islam*, ia menyatakan bahwa pemerintahan yang ada didunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah, karena itu para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan di salah gunakan dan menjadi suatu alat penindas⁴².

Alasan Ulama Yang Membolehkan Pajak :

1. Maliki berpendapat “ Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi “wajib”. Walaupun demikian, syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram.”⁴³
2. Umar Chapra berpendapat “ Sungguh tidak realitas bila sumber perpajakan (pendapatan) negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta berkomitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, tidak perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan investasi serta penerimaan yang

⁴² Hasan Turoby, *Principle Of Governance, Freedom, And Responsibility In Islam*, Dalam Umar Chapra *Op.Cit*, h. 294

⁴³ Abdurahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Jawa Timur : Bangil, 2001), cet I h. 85

memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.⁴⁴

⁴⁴ Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), cet I h. 296

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PAJAK (*DHARIBAH*)

A. Konsep Pajak (*Dharibah*) Menurut Yusuf Qardhawi

Pajak termasuk komponen pendapatan negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam sistem Ekonomi Islam lebih memegang peranan penting bila dibandingkan dengan kebijakan moneter.

Pada masa awal Islam, zakat merupakan 'pungutan' wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat. Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah. Pengembalian zakat ke khittah awalnya ini dapat dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep pajak dalam Islam¹.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa karena tanggung jawab pemerintah telah sangat meningkat sepanjang waktu, dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan, jika ia tidak diizinkan untuk memungut pajak.

¹ [Http://Hizbur](http://Hizbur) Tahrir . Diakses Tanggal 12 Oktober 2009

Dengan demikian memungkinkan bahwa hak dari pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak bisa di tentang asalkan pajak diambil dengan cara yang adil dan dalam batas-batas yang tertentu memungkinkan².

Yusuf Qardhawi membolehkan adanya pajak disamping zakat³. Dalam catatan Qardhawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niat zakat dibolehkan, karena kaum muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al Hasysyami dari Mazhab Syafi'i, Ibn Abidin dari Mazhab Hanafi, dan Syekh Ulaith dari Mazhab Maliki berpendapat sebaliknya zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran tidak menggugurkan kewajiban zakat. Kemudian Yusuf Qardhawi mengatakan zakat adalah kewajiban terhadap agama sedangkan pajak kewajiban terhadap negara.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar di perlukan untuk merealisasikan maqashid syari'ah

² Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), cet II, h.1073

³ *Ibid.*, h. 1112-1124

2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan kepada kemampuan rakyat untuk menanggung dan mendistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur untuk tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa ekonomi Islam membolehkan adanya pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus merata , tidak membebani rakyat dan lain-lain. Jika melanggar dari ketiga ketentuan diatas, maka pajak seharusnya dihapus, dan pemerintah mencukupkan kebutuhan negara dengan sumber pendapatan yang jelas dan nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*)⁴.

Abu Yusuf lebih menekankan dalam pandangannya sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak dan para pengumpulan pajak seperti pada pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini akan menghilangkan kezaliman terhadap pembayaran pajak dan menguntungkan keuangan negara⁵.

Pungutan yang diwajibkan oleh Pemerintah selain zakat dan *kharaj* dalam Islam disebut *dharibah*. *Dharibah* ini dikenal dengan istilah pajak yaitu harta yang wajib dibayar oleh kaum muslim untuk membiayai

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet 1, h. 191

⁵ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam* (Bandung : Nuansa 2005) Cet 1, h. 50

berbagai kebutuhan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang atau harta.

Dharibah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرٌ فِي الْإِسْلَامِ (رواه مالك وابن ماجه والدارقطني)

*Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan.”*⁶

Allah Swt memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan *kemaslahatan* tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar *dharibah* tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang *makruf*.

Dalam pemerintahan Islam *dharibah* merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara disamping sumber-sumber lainnya. Pada masa awal Islam, sumber pendapatan negara adalah zakat yang ditujukan untuk membersihkan harta kekayaan seseorang. Kemudian *jizyah*, pajak perlindungan yang dibebankan kepada kaum *dzimmi* kaum kafir yang di lindungi Islam, sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka keluarga dan miliknya. Pada masa selanjutnya, sumber pendapatan pemerintahan Islam, selain yang disebutkan di atas juga diambil dari

⁶ Imam Musbikin, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet 1, h. 67.

berbagai macam sumber, di antaranya, pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak kepala dan pajak (pemakaian rumah tangga).

Ulama Fiqh Kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya karena ternyata pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim bukan saja kewajiban pajak, tetapi juga kewajiban zakat sekaligus kedua kewajiban tersebut tidak dapat dihindarkan karena ada kewajiban hanya berlaku terhadap zakat saja dan bebas dari pajak, maka pemasukan terhadap negara tidak akan mencukupi dan tidak akan dapat memenuhi anggaran pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai hal-hal yang jauh lebih banyak dari apa yang ditentukan dalam zakat. Dengan demikian, seorang muslim sebagai warga negara akan dapat menghadapi dua kewajiban tersebut⁷.

Dari uraian diatas ulama menolak anggapan memperhitungkan pajak sebagai memenuhi kewajiban zakat. Yusuf Qardhawi menyimpulkan, tidak boleh memperhitungkan pajak sebagai kewajiban zakat karena adalah menghilangkan lembaga zakat itu sendiri, yang berarti menghilangkan salah satu syi'ar Islam.

⁷ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet 1, h.501

Sedangkan Amir Syariffudin mengemukakan alternatif pemecahannya yaitu:

1. Dari segi kadar, seseorang yang dikenai kewajiban zakat dalam harta tertentu, harus mengeluarkan zakat menurut kadar tersebut. Seandainya yang demikian dianggap kurang menurut perhitungan pajak, maka dia harus memenuhi kekurangannya atas nama pajak. Seandainya zakat berlebih dari perhitungan pajak, maka kadar zakatlah yang diperhitungkan. Terhadap harta kekayaan lain yang tidak terkena kewajiban zakat, tetapi kena kewajiban pajak, harus di bayar atas nama pajak.⁸
2. Dari segi niat zakat, pada saat menyerahkan kewajiban dalam bentuk zakat dia harus meniatkan zakatnya. Untuk maksud ini akan lebih utama bila petugas yang memungutnya adalah amil zakat, atau petugas negara yang menerimanya atas nama zakat dengan tanda terima zakat. Adapun kewajiban atas nama pajak diserahkan sebagai pajak dalam kausalitas apapun. Niat ganda dalam hal ini perlu dihindarkan untuk meyakinkan sahnya niat zakat.
3. Dari segi penggunaan, bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya kepada petugas yang ditentukan atas nama zakat, maka kewajiban telah terpenuhi. Tinggal lagi pihak yang menerima penyerahan amanat tersebut untuk menyampaikan

⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *op.cit* . , h. 503.

kepada sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan zakat. Begitu pula dengan penyerahan kewajibannya kepada petugas atas nama pajak, maka selesailah kewajibannya.

Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Ibnu Taimiyah mendukung kuat diterapkannya *dharibah* atau pajak tambahan dan mengemukakan sistesis yang menarik dari dua hadis yang tampak berlawanan tersebut ia mengatakan bahwa:

Tidak ada pertentangan dalam dua hadis ini, karena zakat dan kewajiban zakat disebabkan oleh kekayaan seseorang memiliki alasan yang berbeda. Alasan yang ditetapkan zakat adalah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas maksimum. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajak tambahan (dharibah) bukan sekadar penguasaan kekayaan diatas batas minimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam masyarakat.⁹

Jadi menurut Ibnu Taimiyah negara harus melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan masyarakat. Namun, Ibnu Taimiyyah tidak setuju dengan pemungutan pajak yang tidak didasarkan pada syari'ah karena dalam prakteknya beliau melihat hal tersebut banyak diselewengkan. Menurut Ibnu Taimiyyah adapun pendapatan negara tersebut yaitu terdiri dari tiga macam *ghanimah*, *zakat*, dan *fai'*.

⁹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concept Of Ibnu Taimiyyah*, (London: U.K: Islamic foundation, 1988), h. 197.

Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara.

Kebijakan fiskal dianggap untuk sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan untuk dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah)¹⁰.

Sedangkan Umar Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, namun dengan solusi berbeda dengan Abdul Manan. Chapra berpendapat bahwa negara-negara muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi system perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam¹¹.

Jadi kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang keuangan meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara dan utang negara yang terdapat dalam kesatuan anggaran pendapatan belanja negara(APBN).

Suatu negara tidak perlu lagi mewajibkan adanya pajak (*dharibah*) baik langsung maupun tidak langsung jika sumber-sumber pendapatan yang

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti 1997), Cet I, h.230

¹¹ Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press 2000), Cet I, h. 299.

lain telah mencukupi untuk mengatur rakyat dan melayani kepentingan mereka. Meskipun demikian, hukum syara' mengklasifikasikan kebutuhan menjadi dua, antara lain kebutuhan yang diwajibkan (*di fardhukan*) kepada *baitul mal*, untuk sumber-sumber pendapatan tetap *baitul mal* negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian pajak itu sebenarnya merupakan hal yang difardhukan oleh Allah kepada kaum muslimin. Dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana Allah Swt telah menjadikan seorang iman sebagai pemimpin bagi rakyatnya, yang biasa mengambil harta dan menafkahkan sesuai objek-objek tertentu mengikuti hukumnya.

B. Perkembangan Pajak Menurut Yusuf Qardhawi

Pada masa awal pemerintahan Nabi saw, pendapatan negara sangat kecil. Sumber hanya berasal dari zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun ke- 2 hijriah. Kemudian barulah ditetapkan *jizyah* (pajak) pada tahun ke-7 hijriah.¹²

Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut ulama Fiqh, zakat tidak diwajibkan kepada non muslim, karena zakat merupakan “anggota tubuh” Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak

¹² Karnaeen A Perwataatmadja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Cicero Publishing, 2008), cet I, h. 35.

mungkin diminta menunaikannya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam.

Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat, karena warga negara muslim diwajibkan membayar zakat, sementara warga negara non muslim tidak memikul kewajiban tersebut. Dalam konteks kebijakan fiskal negara, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam memberikan kewajiban kepada negara, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan demikian, jika zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal negara, maka sekat-sekat diskriminasi dalam hukum zakat hendaknya dapat diselesaikan, agar semua warga negara sama kedudukan dalam memenuhi kewajiban kepada negara.¹³

Untuk menyelesaikan persoalan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa warga non muslim dikenakan *jizyah* sebagai penyeimbang zakat yang dibayarkan oleh warga muslim. Hal ini telah dipraktekkan pada masa awal Islam, dimana warga negara non muslim (*dzimmi*) diwajibkan membayar *jizyah* kepada negara sebagai imbalan atas jaminan perlindungan yang mereka terima. Namun, hal ini tentu tidak relevan lagi dimasa sekarang karena semua warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam suatu negara dan sudah jarang dikenal lagi istilah kafir *dzimmi* dalam suatu negara berpenduduk muslim. Adapun kalangan ulama fiqh membolehkan pihak pemerintah untuk menarik pajak kekayaan dari orang-orang kaya

¹³ Abdurahman Yahya , Pajak (*dharibah*), [http: // hayatul Islam.net](http://hayatulIslam.net). Diakses tanggal 16 Oktober 2009.

dengan aturan perundang-undangan yang legal dan mengelola sebagai pelayanan publik, seperti keamanan, pendidikan, pengobatan, penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran dan hal-hak sejenisnya tanpa pembiayaan dari pajak orang kaya ini akan sulit terlaksana. Sedangkan Yusuf Qardhawi secara tegas mengkategorikan pajak yang zhalim sebagai pungutan liar, sebab, ia diambil secara tidak sah dan dibelanjakan pada sesuatu yang tidak sah pula, dan tidak dibagi bebannya yang adil dan merata. Dengan kata lain, pungutan liar adalah pajak yang tidak dibelanjakan untuk kemaslahatan masyarakat melainkan untuk kepentingan dan syahwat para penguasa dan pengikut-pengikut mereka. Pajak itu diambil dari warga negara sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam membayar. Bahkan justru banyak sekali orang kaya yang dibebaskan dari beban pajak karena unsur nepotisme, sementara warga miskin dibebani secara semena-mena. Pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah ulama fiqh.¹⁴

Yusuf Qardhawi mensarikan kewajiban-kewajiban *Ahlu Dzimmah* menjadi tiga butir, yaitu: membayar upeti dan pajak, berkomitmen terhadap hukum undang-undang Islam dalam hubungan kebendaan dan lain-lain, serta menghormati simbol-simbol dan perasaan kaum muslimin.

Terdapat kemungkinan untuk membebani pajak lebih besar kepada *ahlu dzimmah* bila mereka menguasai sejumlah besar sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor. Yusuf Qardhawi mendasarkan hal ini pada

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), cet II, h. 1094.

penafsiran surat at-Taubah yang mengandung ungkapan: "Sehingga mereka (mau) memberikan pajak dari tangan (mereka), sedang mereka adalah kecil." Menurut pendapat sebagian ulama, penggunaan kata "kecil" bukan dimaksudkan untuk merendahkan *Ahlu Dzimmah*, melainkan mempunyai konotasi "Menyerah dan meletakkan senjata serta tunduk pada hukum negara Islam" ¹⁵

Yusuf Qardhawi mendasarkan pula pandangannya pada pemikiran bahwa pajak besar itu dibayarkan sebagai ganti pembiayaan angkatan bersenjata yang hanya diwajibkan bagi kaum muslimin. Dengan pembayaran pajak itu, *ahlu dzimmah* terbebas dari tugas-tugas kemiliteran. ¹⁶

Yusuf Qardhawi mengingatkan bahwa kaum muslimin dikenai pengeluaran yang justru lebih besar untuk pembiayaan zakat. Dalam kitab-kitab fikih mazhab Maliki tertera ketentuan bahwa diundangkannya hukum pajak bagi *ahlu dzimmah* sebagai imbalan hukum zakat bagi kaum muslimin. ¹⁷

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa diperbolehkan mengambil pajak dari *ahlu dzimmah* agar sama dengan orang-orang Islam dalam kewajiban mengeluarkan harta, meskipun pajak tersebut tidak disebut zakat. Pajak ini

¹⁵ <http://www.PajakSyari'ah.Go.id> , Diakses Tanggal 3 November 2009 .

¹⁶ Sarwat Ahmad, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://EraMuslim.Com>. Diakses tanggal 5 November 2009

¹⁷ *Ibid*

juga tidak harus disebut *jizyah* (upeti) bila ahlu *dzimmi* keberatan dengan istilah tersebut. Umar bin Khattab r.a. pernah memungut pajak dari orang-orang Kristen Bani Taghlab dengan istilah *shadaqah*, bukan *Jizyah*, untuk menggembirakan mereka. Yang perlu ditekankan adalah esensinya, bukan nama atau istilah.

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Tidak Ada Sumber Pendapatan Yang Lain

Pajak yang dipungut dari rakyat hendaknya merupakan alternatif terakhir apabila tidak ada sumber pemasukan lain untuk menutupi pengeluaran negara. Menurut Yusuf Qardhawi, pada dasarnya harta seseorang tidak boleh diganggu dan pemiliknya bebas dari segala beban, baik material maupun non material. Dengan demikian, harta seseorang tidak boleh dirusak atau diambil kecuali ada kebutuhan yang pasti. Apabila tidak ada keperluan, atau ada keperluan, sedang pemerintah mempunyai biaya atau punya sumber yang dapat menutupi keperluannya, maka pemerintah tidak boleh membebankan pajak.¹⁸

Para ulama Islam dan para ahli fatwa menekankan agar memperhatikan syari'at ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit* . , 1087.

bolehnya memungut pajak, bila baitul mal benar-benar kosong. Para ulama sangat berhati-hati dalam mewajibkan pembayaran pajak , karena kuatir akan keserakahan pemegang kekuasaan dalam mencari kekayaan, baik waktu mereka memerlukannya atau tidak dan juga dikuatirkan akan membebani rakyat dengan beban harta diluar kemampuannya

2. Pembagian Beban Pajak Yang Adil

Apabila tidak ada jalan lain untuk menutupi kebutuhan negara selain memungut pajak, maka keputusan itu hanya boleh, tetapi wajib dengan syara' diberikan secara adil. Artinya, tiap golongan rakyat memperoleh beban secara adil dan tidak dilakukan secara diskriminatif besarnya pungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga dimungkinkan tidak sama besarnya beban pajak masing-masing anggota masyarakat¹⁹.

Tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial ialah menghindarkan terkumpulnya kekayaan umat ditangan sekelompok kecil anggota masyarakat, lebih-lebih orang asing oleh karena itu islam mendistribusikan kekayaan itu sebanyak mungkin dan berusaha menghilangkan perbedaan yang menyolok, dan berusaha melakukan pemerataan kepada seluruh anggota masyarakat.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Hasyr Ayat 7



¹⁹ Ibid.

Artinya:

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan hukum bahwa hendaknya harta kekayaan tidak hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang saja sementara yang lain gigit jari, tidak bisa menikmatinya.

Sedangkan di Indonesia pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara dan warganya.²⁰

3. Dipergunakan Untuk Membiayai Kepentingan Umat Bukan Kepentingan Maksiat

Pajak tidak cukup Hanya dipungut secara adil dan dikenakan bebannya secara adil sebelum hasilnya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga, pejabat dan orang-orang dekatnya. Hal ini telah diberi oleh para *khulafa rasyidin* dan para sahabat yang menekankan penggunaan kekayaan masyarakat itu pada sasaran yang telah ditetapkan syara’.

²⁰ Mardiamo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Edisi Revisi, 2004), h. 2.

4. Persetujuan Para Ahli Dan Cendikia

Pemerintah suatu negara tidak boleh memungut pajak tanpa mendapat masukan dan persetujuan para ahli dan cendekia dari kalangan masyarakat. Mereka dianggap mampu melakukan analisis terhadap rasionalitas beban pajak terhadap kebutuhan negara, dan mampu membuat peraturan-peraturan yang menjamin pembagian beban itu terhadap rakyat secara adil. Disamping itu, mereka dianggap mampu mengawasi penggunaan hasil pendapatan pajak yang terkumpul, sehingga benar-benar digunakan untuk berbagai kepentingan²¹. Pada masa sekarang, ketentuan pajak tersebut harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat²².

Sedangkan Adam Smith dalam bukunya *Wealth Of Nations* mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut dengan *four canons of nations* atau *the four maxim*. Yaitu :²³

- a. *Equality* (persamaan). Asas ini menekankan bahwa setiap warga negara atau wajib pajak tiap negara harus memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan keuntungan dan perlindungan yang mereka terima dari negara. Menurut asas ini negara tidak boleh mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

²¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit* . , h. 1095

²² *Ibid*

²³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41-42

- b. *Certainty* (kepastian) asas ini menekankan bahwa wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam hal ini hukum sangat penting mengenai subjek dan objek pajak
- c. *Convinency of payment* (menyenangkan) pajak seharusnya dipungut pada waktunya dengan cara yang paling menyenangkan bagi para pembayar pajak.
- d. *Low cost of collection* (efisiensi) asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

Di Indonesia pajak merupakan hal yang vital untuk menjamin kelangsungan pemerintah, sebab bisa menjalankan kewajibannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Untuk menjaga agar hal tersebut tidak ada hambatan, maka pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan dirinya baik orang pribadi maupun pengusaha agar sadar pajak. Kesadaran pajak ini merupakan loyalitas dan kepedulian terhadap negara, dan hal ini dapat dibuktikan dengan mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak maka pemerintah tidak akan keliru menetapkan besar pajak atas wajib pajak karena masyarakat mempunyai nomor pokok wajib pajak.²⁴

²⁴ [http:// Kanwil Pajak Khusus, Depkeu. Go.id.Penyuluhan PPN](http://kanwil.pajak.khusus.depkeu.go.id/penyuluhan/ppn) Diakses tanggal 5 November 2009.

Beban pajak masyarakat (*tax ratio*) Indonesia relatif kecil dan masih dapat ditingkatkan secara berarti. Pemerintah tampaknya menyadari hal ini, bahkan dewasa ini pemerintah sedang menggodok langkah-langkah yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga masa yang akan datang *tax ratio* Indonesia dapat meningkat.

Sejauh mana hal ini dapat diwujudkan, masih merupakan pertanyaan, terlebih karena untuk mencapai sasaran tersebut penerimaan pajak selama lima tahun ke depan harus meningkat setiap tahun, sementara pertumbuhan ekonomi berada jauh dibawahnya. Walaupun pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan pesat, hal ini tidak berarti bahwa pengelolaan (beban) utang dapat diabaikan.

Oleh sebab itu untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan berbagai langkah yaitu:

- a. Menambah wajib pajak, Baru melalui program ekstensifikasi
- b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan sosialisasi
- c. Meningkatkan intensifikasi penagihan sita dan cegah keluar negeri (*gijzeling*)
- d. Dan melakukan pemeriksaan.²⁵

²⁵ Gusfahmi, *op.cit* . , h. 3.

Demikian pula halnya dengan pajak, sehingga umat Islam Indonesia menjadi warga negara yang baik yang kesediaan membayar pajak dan zakat berarti umat Islam ikut andil dalam kegiatan pembangunan.

Bagaimanapun, apabila zakat menjadi roh pajak, maka besar kemungkinan integralisasi zakat dan pajak yang dicita-citakan dapat terealisasi, yang pada gilirannya pajak dapat menjadi instrumen dalam kebijakan fiskal suatu negara.²⁶

Menurut Wolfson kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.²⁷

Pajak boleh saja dianggap utang seseorang kepada negara yang harus dibayarkan sebelum zakat dikeluarkan, tetapi yang terbaik adalah zakat dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian pajak. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan oleh Allah Swt, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan *ijtihad*. Alasan kedua ini sejalan dengan undang-undang nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 17/ 2000 tentang pajak.

Dari kedua undang-undang diatas dapat diketahui bahwa seorang wajib pajak yang beragama Islam yang ingin menunaikan zakat, dimungkinkan untuk membayar pajak lebih sedikit dari nilai seharusnya. Pembayaran pajak lebih sedikit itu, disebabkan karena zakat menurut UU

²⁶ Nuruddin, Ali , *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), cet I, h. 5.

²⁷ *Ibid* . , h. 6

tersebut dapat mengurangi pajak. Maksudnya, setelah dikurangi zakat, jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak akan berkurang, sehingga dengan prosentase yang tetap, nilai pajaknya pun semakin kecil.

Berdasarkan pasal 17 UU no 17/ 2000, ia wajib mengeluarkan pajak sebesar 10 % dari Rp 10 juta yaitu sebesar Rp 1 juta. Tapi, dengan terlebih dahulu membayar zakat sebesar 2,5 % dari penghasilan seluruhnya, yaitu $2,5 \% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = 2,5 \text{ juta}$, maka pendapatan kena pajak yang berjumlah Rp 10 juta dikurangi pembayaran zakat Rp 2,5 juta. Sehingga pendapatan kena pajak hanya 7,5 juta. Maka ia hanya mengeluarkan pajak sebesar 750.000 ($10 \% \times \text{Rp } 7,5 \text{ juta}$).

Dari contoh diatas diketahui bahwa seorang muslim membayar zakat sebesar Rp 2,5 juta sedangkan membayar pajak sebesar Rp 750.000 dengan demikian, nilai pembayaran zakat lebih besar dari pembayar pajak. Berdasarkan realitas itu, maka dapat disimpulkan bahwa zakat potensial dan signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah²⁸

C. Analisa Hukum Islam

Apabila didalam *baitul mal* tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban orang untuk menafkahi orang miskin beralih kekaum muslim secara kolektif.

Firman Allah dalam surat Al-Dzariat ayat 19

²⁸ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Riau:Unri Press 2007), cet I, h. 127

Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang membolehkan kewajiban pajak, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ

“Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan lain yang mubah) maka hal itu menjadi wajib pula.”³⁰

Oleh karena itu, pajak itu boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan dan bencana lainnya. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadis Nabi:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

³⁰ Imam Musbikin, *Qawaid Fiqh* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2001), Cet I h. 130.

Hadis Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma: diriwayatkan dari Nabi Shalallahu'alaihi wa sallam. Sesungguhnya beliau telah bersabda: "kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan wajib bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah pemimpin rumah tangga dari suami dan anak-anaknya, ia wajib bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya, ia wajib bertanggung jawab terhadap harta yang dijaga. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan tersebut."³¹

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat).

1. Penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisiensi untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapa pun kewajiban moral untuk membayar pajak.

Tujuan pajak ialah untuk membayai berbagai pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslim) pada saat kondisi

³¹ Ahmad Mudjab Mahali. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq'alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004) h.254

baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslim, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah pemungutan pajak itu haram. Artinya jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslim, maka ia menjadi haram di pungut, karena tiada “kerelaan” dari si pembayar pajak. Hal ini sesuai dengan hadis

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya :

Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya”³²

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat yang secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya. pajak itu adalah amanah rakyat, ia harus di belanjakan secara jujur dan efisien, untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang untuk tujuan itu pajak di pungut.

Pemungutan Pendapatan Negara

1. Nash yang memerintahnya

Setiap pendapatan dalam negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum

³² Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta : Amzah 2005) Cet I, h.104

syara'.³³. Prinsip kebijakan penerimaan negara yang pertama harus adanya nash (al-Qur'an dan hadis) yang memerintahkannya. Selain harta yang telah difardhukan oleh Allah Swt. Sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab tidak diperbolehkan sedikit pun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Rasulullah bersabda

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبٍ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.”³⁴

Boleh saja suatu negara mengambil pajak dari orang-orang kaya untuk menutupi keperluan negara. Sedangkan mazhab Maliki berprinsip *al maslahah al-mursalah* jika sewaktu-waktu *baitul mal* mengalami defisit, sedangkan kebutuhan untuk membiayai tentara meningkat dan *baitul mal* tidak mampu membiayainya, maka pada saat itu pemerintah boleh memungut secara teratur dari orang-orang kaya, harta secukupnya, sampai *baitul mal* terisi kembali, atau dapat mencukupi.

2. Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan non-muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim.

3. Hanya golongan kaya yang menanggung beban.

³³ Gusfahmi. *op.cit* . , h. 147

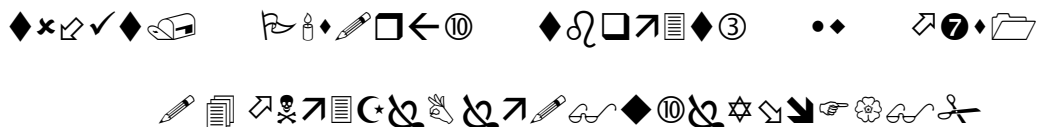
³⁴ Husain *op.cit* . , h 104

Prinsip kebijakan pemasukan yang terpenting adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.

4. Adanya tuntunan kemaslahatan umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara ke empat adalah adanya tuntunan kemaslahatan umum yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (*darurat*), ulil amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhi kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntunan umum inilah, negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.³⁵

Dengan orientasi pemenuhan tanggung jawab sosial maka perputaran kekayaan hanya pada golongan tertentu pun diharapkan akan dapat dihindarkan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 7.



Artinya : *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.*

Adapun kaidah yang memerintahkan untuk memenuhi tuntunan kemaslahatan umum yaitu.

تَصَرَّفُ الْأِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُ طَّ بِلْمَصْلَحَةِ

³⁵ Gusfahmi, *op.cit.* , h. 149

Artinya:

*Tindakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan.*³⁶

Jadi pajak atau *dharibah* adalah harta yang wajib dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan pihak yang diwajibkan atas mereka. Pajak yang dipungut oleh pemerintah apabila pengeluaran atau belanja pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan jalannya roda pemerintahan tidak terpenuhi maka pemerintah mewajibkan pajak kepada umat sesuai dengan kebutuhan. Apabila pemerintah sudah mencukupi untuk pembiayaan dana dari masyarakat maka pajak ini harus dihapuskan.

³⁶ Imam Musbikin, Azis Mushoffa, *Qawaid al fiqqiyah*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada: 2001 Cet I. h. 124

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengambil suatu konklusi sebagai berikut:

1. Kemudian Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah akan melakukan pembiayaan jika tidak diizinkan untuk memungut pajak. Dengan demikian memungkinkan bahwa hak dari pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak bisa ditentang asalkan saja pajak ini diambil dengan cara yang adil dan dalam batas-batas tertentu yang memungkinkan. Kemudian Yusuf Qardhawi menyimpulkan tidak boleh memperhitungkan pajak sebagai kewajiban zakat itu sendiri, yang berarti menghilangkan salah satu syi'ar Islam. Yusuf Qardhawi membolehkan adanya pajak disamping zakat, sedangkan dalam catatan Qardhawi para ulama hanya mendukung pengintegrasian zakat dan pajak baru pada niat saja, sedangkan Yusuf Qardhawi sudah menerapkannya
2. Perkembangan pajak menurut Yusuf Qardhawi secara tegas ia mengkategorikan pajak yang zhalim sebagai pungutan liar. Sebab, ia diambil secara tidak sah dan dibelanjakan pada sesuatu yang tidak sah pula, dan tidak dibagi bebannya yang adil dan merata.

Yang mana Yusuf Qardhawi menjelaskan syarat-syarat pemungutan pajak tersebut terdiri dari beberapa syarat yaitu :

- a. Tidak ada sumber pendapatan yang lain.
- b. Pembagian beban pajak yang adil
- c. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan maksiat
- d. Persetujuan para ahli dan cendikia

Pajak boleh saja dianggap utang seseorang kepada negara harus dibayarkan sebelum zakat dikeluarkan, tetapi yang terbaik dikeluarkan adalah zakat dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian pajak. Alasan kedua ini sejalan dengan UU no 38/ 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU no 17/ 2000 tentang pajak.

3. Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapa pun kewajiban moral untuk membayar pajak. Jadi dapat kita simpulkan tujuan diterapkannya pajak untuk menciptakan kemaslahatan dan mengatasi kemiskinan. Dasar hukum pajak ini ialah berdasarkan hasil ijtihad para ulama.

B.Saran

Setelah penulis membahas dan meneliti pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pajak (*dharibah*) ini, penulis ingin memberikan saran kepada para pembaca bahwa tentang pajak ini.

Adapun Saran-Saran Penulis Yaitu :

1. Pajak untuk kemaslahatan rakyat, oleh karena itu perlu menggali potensi-potensi pajak yang mungkin diambil dari rakyat, yang akan digunakan kembali kepada mereka.
2. Pemimpin hendaknya berlaku adil dan memperhatikan agar dana dari pajak benar-benar untuk mensejahterakan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan.
3. Hendaknya para pengumpul pajak supaya menjalankan rambu-rambu syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: P.T Raja grafindo Persada, 2006)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif 2002)
- Asyhadie, zaeni *Hukum Bisnis*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006)
- Azmi, Sabahudin, *Menimbang Ekonomi Islam* (Bandung, Nuansa 2002)
- Chapra, M Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, 2000)
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan* (Bandung P.T Syamil Cipta Media 2005)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2001)
- Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*(Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006)
- _____ *Ekonomi Makro Islami*,(Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2007)
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Riau: UNRI Press, 2007)
- Mannan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*,(Yogyakarta P.T Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Mujahidin, Akhmad *Ekonomi Islam* (Jakarta P.T Raja Grafindo Persada 2007)
- Mas'udi Masdar F Djamil, Fathurahman, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemamfaatan Zakat, Infaq, Shadaqah,,* (Jakarta: Piramedia, 2004)
- _____ *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Firdaus 1991)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2008)

Qardhawi, Yusuf *Fiqh Zakat* (kairo :Maktabah Wahbah 2006)

_____ *hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan 2007)

_____ *Darul Qiyam Wal Akhlafi Iqtishad* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

_____ *Halal dan Haram, Alih Bahasa Muammal Hamidi* (Surabaya: P.T Bina Ilmu, 2007).

_____ *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta : Rabbani Press 2001)

_____ *Manhaj Fiqh* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)

_____ *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta : Media Dakwah, 1982)

_____ *Huda Al-Islam Fatwa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurahman Al-Bauzir, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : P.T Dana Bhakti Wakaf, 1996)

Syabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah II* (Bandung P.T Al-Ma'arif, 1987)

Sholahuddin, *Azas-Azas Ekonomi*(Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2007)

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Ekonisia 2003)

Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan* (Bandung : P.T Refika Aditama, 1998)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Depi Rianita Sari, dilahirkan di Perawang tanggal 24 April 1985 yaitu desa Perawang kecamatan Tualang kabupaten Siak. Pasangan dari bapak Ramli M, dan Ibu Rahma. Penulis merupakan anak ke empat dari delapan saudara. Penulis memulai pendidikan Dasar Negeri 005 di Perawang pada tahun 1993. Kemudian melanjutkan MTs Al-Wathaniyyah Perawang tamat pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Darul Hikmah Siak Pada tamat pada tahun 2005. Melalui ujian lokal penulis diterima di jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau (UIN SUSKA). Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2008. Penulis melaksanakan penelitian di Pustaka Jami'ah UIN SUSKA dan pada tanggal 23 Maret 2010 penulis mengikuti ujian munaqasah dengan judul skripsi “**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PAJAK (DHARIBAH)**”. Dan dinyatakan lulus dengan prediket sangat memuaskan serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Penulis menamatkan kuliah selama 4,5 tahun.

Organisasi

Penulis pernah menjadi anggota BEM FASIH Periode 2007-2008 bagian Departemen Kemuslimahan

Motto

Kalau ingin sukses ada 3 kunci atau 3 S

- a. Harus SERIUS dalam melakukan semua nya
- b. Harus SANTAI tapi pasti
- c. So, pasti SELESAI